

Dr. Hendri: Mengapa Kebingungan Publik Bisa Menjadi Senjata Strategis

Updates. - KORLANTAS.ID

Jan 10, 2026 - 21:44



OPINI - Kebingungan publik bukan sekadar gejala sosial biasa. Dalam era digital, kebingungan dapat berubah menjadi senjata strategis. Ia tidak selalu muncul karena masyarakat kekurangan informasi. Justru sebaliknya, kebingungan sering lahir karena masyarakat menerima terlalu banyak informasi, terlalu cepat, terlalu emosional, dan terlalu sulit diverifikasi.

Di tengah banjir informasi, publik tidak hanya berhadapan dengan fakta, tetapi

juga dengan potongan fakta, opini, rumor, disinformasi, framing, propaganda, dan manipulasi makna. Semua itu bercampur dalam satu ruang digital yang bergerak sangat cepat. Akibatnya, masyarakat tidak selalu sempat bertanya, “Mana yang benar?” Mereka lebih sering terdorong untuk segera bereaksi: marah, takut, curiga, membenci, atau ikut menyebarkan.

Dalam konteks perang kognitif, kondisi seperti ini bukan kebetulan. Kebingungan dapat dirancang. Ia dapat diproduksi melalui strategi komunikasi yang sengaja menumpuk informasi bertentangan, melemahkan kepercayaan terhadap sumber resmi, memperbesar ketidakpastian, dan membuat publik kehilangan pegangan terhadap realitas. Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa perang kognitif berfokus pada upaya menghasilkan efek kognitif, termasuk memengaruhi cara manusia memahami informasi, mengambil keputusan, dan merespons situasi strategis.

Kebingungan menjadi senjata karena manusia tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan fakta. Manusia juga dipengaruhi oleh emosi, kepercayaan, identitas, pengalaman, dan tekanan sosial. Ketika ruang informasi dibuat kacau, kemampuan publik untuk berpikir jernih menurun. Pada titik itu, masyarakat menjadi lebih mudah diarahkan oleh narasi yang paling keras, paling sering muncul, atau paling sesuai dengan ketakutannya.

Salah satu bentuk paling nyata dari strategi ini adalah information overload. Eppler dan Mengis (2004) menjelaskan bahwa kelebihan informasi terjadi ketika jumlah informasi yang diterima melampaui kapasitas seseorang untuk memprosesnya. Dalam situasi seperti itu, publik tidak menjadi lebih tercerahkan. Publik justru bisa menjadi lelah, bingung, dan akhirnya memilih jalan pintas kognitif: percaya pada tokoh yang disukai, mengikuti mayoritas, menerima judul tanpa membaca isi, atau membagikan informasi karena terasa benar.

Di sinilah kebingungan berubah menjadi alat kendali. Masyarakat yang bingung sulit membangun kesepakatan. Mereka sulit membedakan kritik dari provokasi, fakta dari opini, kesalahan dari pengkhianatan, dan informasi resmi dari propaganda. Ketika kebingungan dibiarkan meluas, ruang publik kehilangan fondasi rasionalnya. Perdebatan tidak lagi bertumpu pada data, tetapi pada kecurigaan.

Kebingungan publik juga dapat diproduksi melalui penyebaran informasi palsu yang masif. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan berita benar di Twitter. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa ekosistem digital sering memberi keuntungan kepada informasi yang sensasional. Kebenaran membutuhkan verifikasi, sementara kebohongan hanya membutuhkan perhatian.

Namun, tujuan strategis dari disinformasi tidak selalu membuat publik percaya pada satu kebohongan tertentu. Tujuan yang lebih berbahaya adalah membuat publik ragu terhadap semua hal. Ketika masyarakat terus-menerus menerima versi informasi yang saling bertentangan, sebagian orang akhirnya menyerah. Mereka berhenti mencari kebenaran dan mulai berkata, “Semua pihak sama saja,” “Tidak ada yang bisa dipercaya,” atau “Kita tidak akan pernah tahu yang sebenarnya.”

Pada titik ini, kebingungan berubah menjadi sinisme. Dan sinisme adalah lahan subur bagi manipulasi. Publik yang sinis mudah diarahkan untuk membenci institusi, menolak data resmi, meragukan media kredibel, dan percaya pada sumber alternatif yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kepercayaan publik runtuh, stabilitas sosial ikut melemah.

Misinformasi juga memiliki efek yang panjang. Lewandowsky, Ecker, Seifert, Schwarz, dan Cook (2012) menjelaskan bahwa informasi keliru dapat terus memengaruhi ingatan dan penilaian seseorang meskipun koreksi telah diberikan. Inilah sebabnya klarifikasi sering datang terlambat. Ketika narasi palsu sudah menyentuh emosi publik, bantahan faktual tidak selalu cukup untuk menghapus dampaknya.

Kebingungan publik juga diperkuat oleh pengulangan. Dalam psikologi kognitif, dikenal *illusory truth effect*, yaitu kecenderungan manusia menilai informasi yang berulang sebagai lebih benar, meskipun pengulangan itu tidak menambah bukti. Henderson, Simons, dan Barr (2021) menunjukkan bahwa pernyataan yang diulang cenderung dinilai lebih benar dibandingkan pernyataan baru. Dalam perang narasi, pengulangan menjadi alat strategis. Sebuah tuduhan yang terus diulang dapat terasa seperti fakta. Sebuah rumor yang terus muncul dapat terasa seperti kenyataan. Sebuah framing yang terus disebarakan dapat membentuk cara publik membaca peristiwa.

Strategi kebingungan juga bekerja melalui framing. Chong dan Druckman (2007) menunjukkan bahwa framing dapat memengaruhi opini publik, terutama melalui kualitas bingkai pesan yang digunakan dalam suatu isu. Dalam praktiknya, satu peristiwa dapat diberi banyak bingkai berbeda: keberhasilan dapat dibingkai sebagai pencitraan, kebijakan dapat dibingkai sebagai ancaman, kritik dapat dibingkai sebagai permusuhan, dan kesalahan administratif dapat dibingkai sebagai bukti keruntuhan sistem.

Framing semacam ini tidak selalu sepenuhnya palsu. Justru di situlah bahayanya. Ia sering menggunakan potongan fakta yang benar, tetapi ditempatkan dalam konteks yang menyesatkan. Publik menerima bagian kecil dari kebenaran, lalu diarahkan untuk mengambil kesimpulan besar yang keliru. Maka, kebingungan bukan hanya akibat hoaks, tetapi juga akibat manipulasi konteks.

Dalam ruang digital, kebingungan juga diperbesar oleh algoritma. Publik tidak melihat realitas secara utuh. Mereka melihat realitas yang telah dipilihkan oleh sistem berdasarkan riwayat klik, minat, emosi, dan interaksi sebelumnya. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa semua orang sedang marah, semua orang membenci kebijakan tertentu, atau semua orang mempercayai isu tertentu, padahal yang ia lihat hanyalah potongan realitas yang disusun oleh algoritma perhatian.

Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap operasi kognitif. Ketika publik kehilangan orientasi, aktor manipulatif dapat menawarkan narasi sederhana: siapa musuhnya, siapa pengkhianatnya, siapa penyelamatnya, dan siapa yang harus disalahkan. Narasi sederhana seperti ini sangat menggoda di tengah situasi rumit. Masyarakat yang lelah dengan kompleksitas cenderung mencari

jawaban cepat, meskipun jawaban itu keliru.

Pennycook dan Rand (2019) menemukan bahwa kerentanan terhadap berita palsu lebih terkait dengan rendahnya penalaran analitis daripada semata-mata bias politik. Artinya, masalah utama masyarakat digital bukan hanya keberpihakan, tetapi juga melemahnya kebiasaan berpikir pelan, memeriksa, membandingkan, dan menunda kesimpulan.

Kebingungan publik menjadi senjata strategis karena ia melemahkan tiga hal sekaligus. Pertama, melemahkan kepercayaan. Ketika publik bingung, mereka tidak tahu siapa yang layak dipercaya. Kedua, melemahkan keputusan. Ketika publik bingung, mereka sulit mengambil sikap rasional. Ketiga, melemahkan persatuan sosial. Ketika publik bingung, kelompok masyarakat mudah saling curiga dan saling menyalahkan.

Dalam konteks negara demokratis, ini sangat berbahaya. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu menilai informasi, memperdebatkan kebijakan secara rasional, dan mempercayai prosedur bersama. Jika publik dibuat bingung terus-menerus, demokrasi tidak langsung runtuh, tetapi perlahan kehilangan kualitasnya. Pemilu menjadi arena emosi. Kebijakan publik menjadi sasaran rumor. Institusi negara menjadi objek kecurigaan permanen. Media kredibel disamakan dengan akun anonim. Pakar dianggap tidak lebih berharga daripada komentar viral.

Karena itu, kebingungan publik tidak boleh dianggap sebagai masalah komunikasi biasa. Ia adalah masalah ketahanan sosial. Bangsa yang masyarakatnya mudah dibuat bingung akan mudah dipecah. Bangsa yang publiknya kehilangan kepercayaan akan sulit bergerak bersama. Bangsa yang ruang digitalnya dipenuhi kecurigaan akan sulit membangun konsensus nasional.

Melawan kebingungan publik tidak cukup hanya dengan membantah hoaks. Negara, media, kampus, sekolah, organisasi masyarakat, dan keluarga harus membangun ekosistem kejernihan. Informasi resmi harus cepat, terbuka, konsisten, dan mudah dipahami. Media harus menjaga disiplin verifikasi. Kampus harus memperkuat pendidikan literasi digital dan berpikir kritis. Sekolah harus mengajarkan cara membaca sumber, memeriksa konteks, dan mengenali manipulasi emosi. Keluarga harus membiasakan diskusi sehat sebelum membagikan informasi.

Selain itu, masyarakat perlu diberi “vaksin kognitif”. Roozenbeek, van der Linden, Goldberg, Rathje, dan Lewandowsky (2022) menunjukkan bahwa inokulasi psikologis dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap misinformasi di media sosial. Pendekatan ini penting karena publik tidak hanya diberi tahu mana informasi yang salah, tetapi juga diajari mengenali pola manipulasi: pemotongan konteks, kambing hitam, dikotomi palsu, teori konspirasi, otoritas palsu, dan penggunaan emosi berlebihan.

Pada akhirnya, kebingungan publik menjadi senjata strategis karena ia menyerang fondasi paling dasar dari kehidupan bersama: kemampuan membedakan benar dan salah. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan fakta dari manipulasi, ruang publik kehilangan arah. Ketika ruang publik kehilangan arah, siapa pun yang paling mahir memainkan emosi dapat

mengendalikan percakapan.

Di tengah perang kognitif, kejernihan berpikir adalah bentuk pertahanan.
Memeriksa informasi sebelum membagikan adalah tindakan kewargaan.
Menunda reaksi sebelum memahami konteks adalah bentuk kedewasaan digital.
Menguatkan daya kritis masyarakat adalah agenda strategis bangsa.

Kebingungan publik memang tampak seperti kekacauan. Tetapi di tangan aktor yang berkepentingan, kekacauan itu bisa menjadi senjata. Karena itu, tugas utama masyarakat digital bukan hanya menjadi cepat dalam menerima informasi, tetapi kuat dalam menyaring makna. Sebab bangsa yang mampu menjaga kejernihan pikirannya tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan, tidak mudah diprovokasi oleh rumor, dan tidak mudah dikalahkan oleh manipulasi.

Jakarta, 10 Januari 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)